



# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018



DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PAYAKUMBUH

#### **KATA PENGANTAR**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun sebagai salah satu instrument dalam upaya untuk mewujudkan Pembangunan yang tepat sasaran dan terukur di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh dan sebagai media pertanggungjawaban serta sarana informasi Pemerintah Kota Payakumbuh dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pada umumnya. Secara garis besar Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini berisi informasi tentang perencanaan dan capaian kinerja tahun pertama periode 2017-2022 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), baik keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis juga memuat aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara dana masyarakat yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diterima masyarakat.

Besar harapan kami bahwa penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh ini dapat menjadi salah satu pemacu dalam memperbaiki kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek-aspek perencanaan, pengorganisasian, maupun koordinasi pelaksanaannya.

Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini masih belum sempurna. Dengan demikian Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Kota Payakumbuh sangat mengharapkan adanya kritik dan saran konstruktif guna perbaikan laporan di tahun mendatang.

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh.

Payakumbuh, Januari 2019 Kepala Dinas Koperasi dan UKM

Kota Payakumbuh

DAHLER SH

## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi	2
C. Isu Strategis	4
D. Landasan Hukum	5
E. Sistematika	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1. Perencanaan Strategis Sebelum Reviu	7
A. Rencana Strategis	7
B. Indikator Kinerja Utama	11
C. Perjanjian Kinerja 2018	12
2.2. Perencanaan Strategis Hasil Reviu	13
A. Rencana Strategis Hasil Reviu	14
B. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu	16
C. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Kerangka Pengukuran Kinerja	20
B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	23
C. Akuntabilitas Keuangan	65
D. Prestasi dan Penghargaan	67
RAR IV DENI ITI ID	68

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Dinas Koperasi	10
	dan UKM Kota Payakumbuh	
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan UKM Kota	11
	Payakumbuh Tahun 2018	
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh	13
Tabel 2.4	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Hasil Reviu Dinas	15
	Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh	
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria	17
	Indikator Kinerja Hasil Reviu Dinas Koperasi dan UKM Kota	
	Payakumbuh Tahun 2018	
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Hasil Reviu Dinas Koperasi dan UKM Kota	19
	Payakumbuh Tahun 2018	
Tabel 3.1	Pencapaian Target Sasaran	21
Tabel 3.2	Penetapan Kinerja Sasaran Dinas Koperasi dan UKM Kota	21
	Payakumbuh Tahun 2018	
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan UKM Kota	23
	Payakumbuh Tahun 2018	
Tabel 3.4	Pencapaian Target Sasaran	24
Tabel 3.5	Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Kesejahteraan	25
	Anggota Koperasi	
Tabel 3.6	Nilai SHU Koperasi Tahun 2016-2018	26
Tabel 3.7	Persentase Peningkatan SHU Koperasi Tahun 2016-2018	27
Tabel 3.8	Data Jumlah Koperasi yang RAT, tidak RAT dan yang Tidak	28
	Aktif serta yang Baru di Kota Payakumbuh Tahun 2016-2018	
Tabel 3.9	Jenis Koperasi Kota Payakumbuh Tahun 2016-2018	29
Tabel 3.10	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase	30
	Peningkatan Koperasi Aktif dengan Capaian Kinerja Dinas	
	Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat	
Tabel 3.11	Nilai Aset Koperasi Tahun 2016-2018	32
Tabel 3.12	Persentase Pertumbuhan Aset Koperasi Tahun 2016-2018	32

Tabel 3.13	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase  Pertumbuhan Aset Koperasi dengan Capaian Kinerja Dinas  Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat	34
Tabel 3.14	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Anggota Koperasi	35
Tabel 3.15	Program, kegiatan, anggaran dan output yang dihasilkan untuk mendukung sasaran meningkatnya kesejahteraan anggota koperasi	35
Tabel 3.16	Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2018	38
Tabel 3.17	Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro Kecil Menengah	39
Tabel 3.18	Perkembangan UMKM Tahun 2016-2018	40
Tabel 3.19	Jumlah tenaga kerja sektor UMKM tahun 2016-2018	43
Tabel 3.20	Program, kegiatan, anggaran dan output yang dihasilkan untuk mendukung sasaran meningkatnya kualitas usaha mikro kecil menengah	44
Tabel 3.21	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro Kecil Menengah	46
Tabel 3.22	Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2018 Sasaran 2	47
Tabel 3.23	Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	48
Tabel 3.24	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kota Payakumbuh Tahun 2016-2018	49
Tabel 3.25	Produksi Padi, Daging Sapi dan Telur di Kota Payakumbuh Tahun 2017-2018	51
Tabel 3.26	Harga Rata-Rata Komoditas Beras, Daging Sapi dan Telur Kota Payakumbuh Tahun 2017-2018	51
Tabel 3.27	Omset Komoditi Beras, Daging Sapi dan Telur Kota Payakumbuh Tahun 2017-2018	52
Tabel 3.28	Program, kegiatan, anggaran dan output yang dihasilkan untuk mendukung sasaran meningkatnya kontribusi sektor	53

	perdagangan terhadap PDRB					
Tabel 3.29	Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Dinas Koperasi dan	61				
	UKM Tahun 2018 Sasaran 3					
Tabel 3.30	Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas	62				
	Kinerja Dinas Koperasi dan UKM					
Tabel 3.31	Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Dinas Koperasi dan	64				
	UKM Tahun 2018 Sasaran 4					
Tabel 3.32	Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi dan UKM Kota	65				
	Payakumbuh Tahun 2018					
Tabel 3.33	Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Dinas Koperasi	66				
	dan UKM Kota Payakumbuh Tahun 2018					
Tabel 3.34	Prestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat 67					

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2018	3
Gambar 3.1	Persentase Peningkatan SHU Tahun 2016-2018	27
Gambar 3.2	Persentase Pertumbuhan Aset Koperasi Tahun 2016-2018	33
Gambar 3.3	Perkembangan UMKM Tahun 2016-2018 di Kota Payakumbuh	41
Gambar 3.4	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2016-	49
	2018	
Gambar 3.5	Distribusi Persentase PDRB Kota Payakumbuh atas Dasar	50
	Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2017	

#### BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Koperasi dan UKM selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Payakumbuh, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh Tahun 2018 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

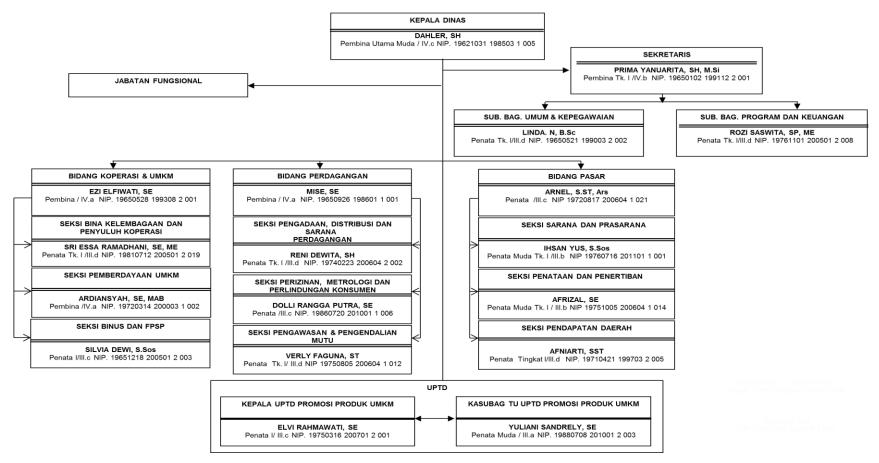
#### B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Payakumbuh, Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh dengan tipologi B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Bidang Perdagangan. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban Dinas Koperasi dan UKM mempunyai fungsi :

- 1. Penyusunan Kebijakan Teknis urusan pemerintahan Bidang Koperasi dan UKM
- 2. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Koperasi dan UKM
- 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Koperasi dan UKM
- 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

#### STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PAYAKUMBUH



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh
Tahun 2018

Dari gambar terlihat bahwa dalam pelaksanaan tugas pokok dan mewujudkan visi dan misi Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh dilaksanakan oleh Kepala Dinas dibantu oleh 1 (satu) sekretariat, 3 (tiga) bidang dan 45 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) serta 80 orang Tenaga Harian Lepas (THL).

## C. Isu Strategis

1. Rendahnya Kapasitas SDM pengurus dan manajemen koperasi

Koperasi sulit berkembang disebabkan oleh banyak faktor, antara lain disebabkan Sumber Daya Manusia yang kurang. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah pengurus koperasi. Seperti yang sering dijumpai, pengurus koperasi biasanya merupakan tokoh masyarakat sehingga dapat dikatakan rangkap jabatan, kondisi seperti inilah yang menyebabkan ketidakfokusan terhadap pengelolaan koperasi itu sendiri. Selain rangkap jabatan biasanya pengurus koperasi sudah lanjut usia sehingga kapasitasnya terbatas, pengurus koperasi masih kurang profesional dalam mengelola koperasi, aturan kelembagaan koperasi belum berbasis kinerja. Kondisi ini perlu mendapat perhatian pemerintah dalam hal mengoptimalkan penguatan kelembagaan koperasi melalui pembinaan dan pendampingan yang intensif.

2. Struktur pelaku usaha didominasi usaha mikro informal dengan produktivitas terbatas.

Saat ini masih banyak pelaku UMKM yang memilih untuk tetap informal, tidak memiliki izin usaha atau CV, mereka belum melihat manfaat yang bisa mereka dapatkan ketika usahanya sudah legal di mata hukum, sehingga pemerintah kesulitan untuk mendeteksi dan memantaunya. Dari hasil temuan riset ditemukan bahwa dana bantuan dari pemerintah sering kali tidak mencapai seluruh pelaku UMKM yang ada. Hal tersebut diakibatkan adanya ketidaktahuan dari pemerintah terhadap UMKM yang ada didaerahnya. Kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM, pertama harga bahan baku yang tidak stabil. Selain harga juga terkadang ketersediaan bahannya tidak menentu. Kedua, kurangnya tenaga kerja yang terampil. Dengan tenaga kerja seadanya akan sulit bagi UKM untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Dan, yang ketiga adalah peraturan yang diberikan oleh pemerintah terlalu mendasar.

3. Belum optimalnya kerjasama perdagangan antar daerah.

Menurunnya koordinasi antar wilayah, dan makin menguatnya ego masing-masing daerah, mengecilnya skala ekonomi daerah merupakan salah satu implikasi dari penerapan desentralisasi. Daerah terbagi dalam wilayah-wilayah administratif yang lebih kecil. Dengan fakta tersebut seharusnya dapat semakin meningkatkan kesadaran bahwa daerah perlu bekerjasama dalam penanganan isu-isu regional yang melibatkan dua atau lebih daerah yang berdekatan dan terkena dampak eksternalitas kepada daerah lain. Salah satu bentuk kerjasama antar daerah melalui kegiatan perdagangan bersama. Beberapa daerah yang memiliki karakteristik yang sama atau berada di dalam satu kawasan telah melakukan kerjasama ini. Perdagangan bersama melalui pasar lelang dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan menyertakan peserta yang luas, tidak hanya terbatas pada pedagang-pembeli yang berasal dari daerah tersebut, namun juga dari luar daerah.

#### D. Landasan Hukum

LKjIP Kota Payakumbuh ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- 7. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Payakumbuh.
- Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana
   Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 –
   2022.

#### E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh Tahun 2018 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi OPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### 2.1. Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

#### A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh.

Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor : 32 Tahun 2018 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2022. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan /kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022.

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD,

Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

#### 1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Payakumbuh dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Payakumbuh Maju, Sejahtera dan Bermartabat, dengan Semangat Kebersamaan Menuju Payakumbuh Menang.

Visi Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 adalah : "Terwujudnya Koperasi, UMKM dan Perdagangan Yang Berdaya Saing, Tangguh, Mandiri dan Berkeadilan Bertumpu Pada Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal".

#### 2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut:

- a. Menumbuhkan dan mengembangkan koperasi yang mampu berperan sebagai wadah penggerak ekonomi masyarakat.
- b. Meningkatkan pengembangan UMKM
- c. Mengembangkan perdagangan yang berdaya saing, tangguh, mandiri dan taat hukum.

#### 3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 sebanyak 4 (empat) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Terwujudnya koperasi yang	Meningkatnya kesejahteraan	Persentase peningkatan SHU	%	7,26	10,00	12,15	14,25	16,40	18,30
	mandiri	anggota koperasi	Persentase Pertumbuhan aset	%	2,77	5,00	6,50	8,55	10,50	12,60
2	Terwujudnya UMKM yang	Meningkatnya kualitas usaha mikro	Persentase UKM terhadap UMKM	%	27,14	27,64	28,15	28,66	29,18	29,70
	berdaya saing	kecil dan menengah	Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja Sektor UMKM	%	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00
3	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sektor perdagangan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	23,92	23,97	24,02	24,07	24,12	24,17
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi dan UKM	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi dan UKM	Hasil Penilaian AKIP Dinas Koperasi dan UKM oleh Inspektorat	Nilai	ВВ	ВВ	A	A	A	A

Sumber : Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM 2017-2022

#### B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Payakumbuh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor: 81 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh Tahun 2018

				Р	ENJELASAN	
N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	kesejahteraan anggota SHU 25 Tahur tentang Perkoper No. 09/19 Pelaksar Kegiatan Pertumbuhan aset % Pedomai 19/2008 Pedomai		Perkoperasian, PP No. 09/1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan USP oleh Koperasi dan Permeneg No. 19/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan	Jumlah SHU tahun ke n dikurangi jumlah SHU tahun ke n-1 dibagi jumlah SHU tahun ke n-1 dikali 100% Jumlah aset koperasi tahun ke n dikurangi jumlah aset koperasi tahun ke n-1	Dinas Koperasi dan UKM  Dinas Koperasi dan UKM	
2	Meningkatnya kualitas usaha	Persentase UKM	%	Kegiatan USP oleh Koperasi Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008	dibagi jumlah aset koperasi tahun ke n-1 dikali 100% Jumlah Usaha Kecil	Dinas Koperasi
	mikro kecil dan menengah	kro kecil dan terhadap		tentang UMKM, PP No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil	Menengahtahun n dibagi jumlah UMKM tahun n dikali 100%	dan UKM

				PENJELASAN					
N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA			
		Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja Sektor UMKM	%		Jumlah tenaga kerja tahun n dikurangi jumlah tenaga kerja tahun n-1 dibagi jumlah tenaga kerja tahun n-1 dikali 100%				
3	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, Permendag No. 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Permendag No. 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Pasar	Distribusi persentase kategori perdagangan dibagi total 22 kategori PDRB dikali 100%	Badan Pusat Statistik			
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi dan UKM	Hasil penilaian AKIP Dinas Koperasi dan UKM oleh Inspektorat	Nilai	Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Instansi Pemerintah	Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Kota Payakumbuh	Inspektorat Kota Payakumbu h			

Sumber : Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2017-2022

## C. Perjanjian Kinerja 2018

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa

yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh Tahun 2018 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018. Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh
Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kesejahteraan	Persentase peningkatan SHU	10,00
	anggota koperasi	Persentase Pertumbuhan Aset	5,00
2	Meningkatnya kualitas usaha mikro	Persentase UKM terhadap UMKM	27,64
	kecil dan menengah	Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja Sektor UMKM	12,00
3	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi setor perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	23,97
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi dan UKM	Hasil penilaian AKIP Dinas Koperasi dan UKM oleh Inspektorat	BB

Sumber: Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2017-2022

#### 2.2. Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Payakumbuh juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dengan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil

reviu tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2018, sebagai berikut :

#### A. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Dinas terutama merevisi indikator kinerja pada seluruh sasaran, selain bertambahnya jumlah indikator juga merevisi penempatan indikator kinerja strategis menjadi lebih menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2017-2022.

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh antara lain :

- 1. Rekomendasi Bappeda Kota Payakumbuh
  - Pada formulasi pengukuran untuk tiap-tiap kriteria indikator dibuat rumus masing-masing.
  - Indikator yang merupakan output kegiatan disarankan untuk dihapus.
- Rekomendasi Narasumber Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  - Penggabungan beberapa indikator menjadi indikator yang dapat menggambarkan cakupan kinerja sasaran penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Dinas
  - Beberapa indikator dihapus karena merupakan output kegiatan
  - Kriteria indikator lembaga kemasyarakatan yang aktif perlu ditambah kriteria yang lainnya
  - Penggabungan kriteria dalam satu indikator kinerja
  - Cascading pada semua indikator harus dibagi habis ke masing-masing kepala seksi dengan penghitungan bobot dari masing-masing capaian kinerja.

Berdasarkan hasil reviu dan tindak lanjut perbaikan Rencana Strategis Dinas tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu
Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Terwujudnya koperasi yang mandiri	Meningkatnya kesejahteraan anggota koperasi	Persentase peningkatan SHU koperasi	%	7,26	10,00	12,15	14,25	16,40	18,30
			Persentase pertumbuhan aset koperasi	%	2,77	5,00	6,50	8,55	10,58	12,60
2	Terwujudnya UMKM yang berdaya saing	Meningkatnya kualitas usaha mikro kecil dan menengah	Persentase usaha kecil menengah terhadap UMKM	%	27,14	27,64	28,15	28,66	29,18	29,70
		J	Persentase pertumbuhan tenaga kerja sektor UMKM	%	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00
3	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi (LPE)	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	23,92	23,97	24,02	24,07	24,12	24,17
	sektor perdagangan	terhadap PDRB	Persentase pertumbuhan omset	%	25,00	27,00	29,00	31,00	33,00	35,00
4	Terwujudnya akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi dan UKM	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi dan UKM	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	BB	BB	А	A	A	А

Sumber : Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2017-2022

### B. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis Dinas juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu Dinas Koperasi dan UKM Kota PayakumbuhTahun 2018

	CACADAN	INDIKATOR			PENJELASAN		KETERANGAN
No	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN /KRITERIA
1	Meningkat nya kesejahtera an anggota koperasi	Persentase Peningkatan SHU Koperasi	%	Tahun 1992 tentang Perkoperasian, PP No. 09/1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan USP oleh Koperasi dan Permeneg No. 19/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan USP	Jumlah SHU tahun ke n dikurangi jumlah SHU tahun dasar (2016) dibagi jumlah SHU tahun dasar (2016) dikali 100%	Dinas Koperasi dan UKM	Melakukan pembinaan, pengawasan dan pelatihan ke koperasi- koperasi untuk mendorong pertumbuhan koperasi
		Persentase Pertumbuhan Asset Koperasi	%		Jumlah aset koperasi tahun ke n dikurangi jumlah aset koperasi tahun ke n-1 dibagi jumlah aset koperasi tahun ke n-1 dikali 100%	Dinas Koperasi dan UKM	Melakukan pembinaan, pengawasan dan pelatihan ke koperasi- koperasi untuk mendorong pertumbuhan koperasi
2	ya kualitas usaha mikro kecil dan menengah	Persentase Usaha Kecil Menengah terhadap UMKM  Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja Sektor UMKM	Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, PP No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha	Jumlah Usaha Kecil Menengah tahun ke n dibagi jumlah UMKM tahun ke n dikali 100%	Dinas Koperasi dan UKM	Melalui pelaksanaan Diklat, Bimtek, Workshop dll	
			Kecil	Jumlah tenaga kerja sektor UMKM tahun n dikurangi jumlah tenaga kerja sektor UMKM tahun ke n-1 dibagi jumlah tenaga kerja sektor UMKM tahun ke n-1 dikali 100%	Dinas Koperasi dan UKM	Melalui pelaksanaan Diklat, Bimtek, Workshop dll	

	INDIKATOR				PENJELASAN			
Nc	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN /KRITERIA	
	sektor	Kontribusi sektor berdagangan erhadap PDRB	%	Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Permendag Nomor 53/M-	Distribusi persentase kategori perdagangan dibagi total 22 kategori PDRB dikali 100%	Badan Pusat Statistik	Melalui pelaksanaan diklat, bimtek, workshop, pembangunan sarana dan prasarana perdagangan dan	
	terhadap PDRB		%	Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Permendag Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Pasar	Jumlah omset tahun ke n dikurangi jumlah omset tahun ke n-1 dibagi jumlah omset tahun ke n-1 dikali 100%	Dinas Koperasi dan UKM	pasar	
		Nilai evaluasi AKIP oleh nspektorat		Sesuai amanat Perpres No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Koperasi dan UKM	Inspektorat	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Koperasi dan UKM diukur sesuai dengan Permenpan Nomor 25/2012 tentang Juklak Evaluasi AKIP	

Sumber : Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2017-2022

## C. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas hasil reviu dan sebagai bahan Tahun 2018 diperjanjikan antara Kepala Dinas dengan Walikota dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Hasil Reviu Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kesejahteraan anggota	Persentase peningkatan SHU koperasi	%	10,00
	koperasi	Persentase pertumbuhan aset koperasi	%	5,00
2	Meningkatnya kualitas usaha mikro kecil dan	Persentase Usaha Kecil Menengah terhadap UMKM	%	27,64
	menengah	Persentase pertumbuhan tenaga kerja sektor UMKM	%	12,00
3	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	23,97
	terhadap PDRB	Persentase pertumbuhan omset	%	27,00
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi dan UKM	Hasil penilaian AKIP oleh Inspektorat	Nilai	ВВ

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2022 maupun Rencana KerjaTahun 2018. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Dinas Koperasi dan UKM.

#### A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Penilaian Capaian Kinerja

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh Tahun 2018

NO	Kategori	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 - 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masingmasing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2018 hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama SKPD berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh Nomor: 530.120/SK/DKUKM-SEK/2018, telah ditetapkan 4 (empat) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut:

Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh Nomor : 530.120/SK/DKUKM-SEK/2018 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022. Upaya untuk meningkatkan

akuntabilitas, Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh Tahun 2018 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh
Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian%
1	Persentase peningkatan SHU	%	10,00	6,03	60,33
I	koperasi				
2	Persentase pertumbuhan aset	%	5,00	5,30	106,00
	koperasi				
3	Persentase Usaha Kecil	%	27,64	15,27	55,25
3	Menengah terhadap UMKM				
4	Persentase pertumbuhan tenaga	%	12,00	14,18	118,17
	kerja sektor UMKM				
5	Kontribusi sektor perdagangan	%	23,97	24,16	100,79
3	terhadap PDRB				
6	Persentase pertumbuhan omset	%	27,00	6,45	23,89
7	Nilai evaluasi AKIP oleh	Nilai	BB	Α	115,14
	Inspektorat				

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukan pada indikator 1, dengan capaian kinerja 60,33%, indikator 3 dengan capaian 55,25% dan indikator 6 dengan capaian kinerja 23,89%. Sedangkan indikator yang melebihi target adalah indikator 2 dengan capaian kinerja 106,00%, indikator 4 dengan capaian 118,17%, indikator 5 dengan capaian 100,79% dan indikator 7 dengan capaian 115,14%.

#### B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2017-2022. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk

mencapai visi dan misi Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 sebanyak 4 (empat) sasaran.

Tahun 2018 adalah tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM, dari 4 (empat) sasaran strategis dengan 7 (tujuh) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Pencapaian target Sasaran

				Tin	ngkat Pend	apaia	an		
No	Sasaran	Jumlah IndikatorSasaran	target(	Melampaui target(>100%)					
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Sasaran 1 : Meningkatnya kesejahteraan anggota koperasi	2	1	106,00%			1	60,33%	
2	Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas usaha mikro kecil dan menengah	2	1	118,17%			1	55,25%	
3	Sasaram 3: Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	2	1	100,79%			1	23,89%	
4	Sasaran 4 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi dan UKM	1	1	115,14%					
	Jumlah	7	4				3		

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan

dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandinganpembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2018 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 4 sasaran dan 7 indikator kinerja dari 3 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh tahun 2017-2022, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

#### Sasaran 1

#### Meningkatnya kesejahteraan anggota koperasi

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.5
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kesejahteraan Anggota Koperasi

No	Indikator Kinerja	Capaian 2017 Satuan	Tahun 2018		%	Target Akhir	%	
			Satuan	Target	Realisasi	70	Renstra	/0
1	Persentase peningkatan SHU koperasi	2,18	%	10,00	6,03	60,33	18,30	29,27
2	Persentase pertumbuhan aset koperasi	14,54	%	5,00	5,30	106,00	12,60	42,06
	Rata-rata Cap	oaian Kinerja	3			83,17		35,67

Sasaran meningkatnya kesejahteraan anggota koperasi dapat dilihat dari 2 (dua) indikator : persentase peningkatan SHU koperasi dan persentase pertumbuhan aset koperasi.

#### a. Persentese peningkatan SHU koperasi

SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurang dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan (UU Koperasi Nomor 25 Tahun 1992).

Formulasi perhitungan persentase peningkatan SHU koperasi adalah sebagai berikut :

\_\_\_\_\_\_

Formulasi peningkatan SHU koperasi = (nilai SHU tahun n-nilai SHU tahun dasar (2016) / nilai SHU tahun dasar (2016)  $\times$  100%

Nilai SHU koperasi di Kota Payakumbuh dari Tahun 2016-2018 disajikan pada tabel 3.6 berikut ini :

Tabel 3.6 Nilai SHU Koperasi Tahun 2016-2018

N	No.	Uraian	Tahun			
		Oralan	2016 2017		2018	
•	1.	SHU	6.297.446.703	6.434.479.000	6.677.346.000	

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa SHU koperasi pada tahun 2017 adalah Rp.6.434.479.000,- dan pada tahun 2018 adalah Rp. 6.677.346.000,-, yang berasal dari simpan pinjam Rp. 5.868.309.000,- dan sektor riil sebanyak Rp. 811.641.000,- sehingga persentase peningkatan SHU koperasi dihitung berdasarkan formulasi di atas adalah :

## $(6.677.346.000 - 6.297.446.703) \times 100\% = 6,03\%$

6.297.446.703

Berdasarkan perhitungan di atas, capaian kinerja nyata indikator persentase peningkatan SHU koperasi adalah sebesar 6,03% dari target sebesar 10.00% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 60,33% atau tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator persentase peningkatan SHU dari tahun 2016-2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

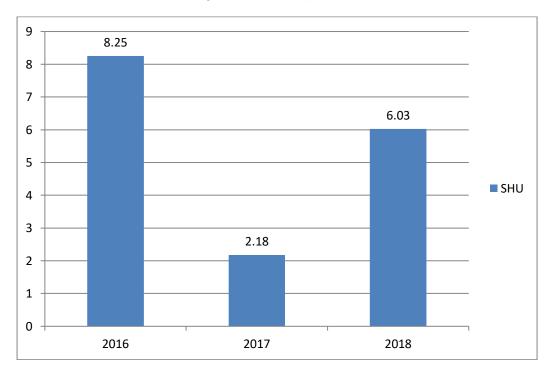
Tabel 3.7 Persentase Peningkatan SHU Koperasi Tahun 2016-2018

No	Uraian	Tahun		
INO	Oralan	2016	2017	2018
1.	Persentase peningkatan	8,25	2,18	6,03
	SHU koperasi (%)			

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM

Capaian kinerja nyata indikator persentase peningkatan SHU dari tahun 2016-2018 juga disajikan dalam bentuk grafik seperti dibawah ini :

Gambar 3.1 Persentase Peningkatan SHU Koperasi Tahun 2016-2018



Dari tabel 3.7 dan gambar 3.1 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 pencapaian kinerja nyata indikator persentase peningkatan SHU koperasi meningkat dibandingkan dengan tahun 2017, namun bila dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami penurunan. Tahun 2016 merupakan angka dasar dalam penetapan target indikator kinerja persentase peningkatan SHU koperasi pada Renstra tahun 2017-2022.

Capaian indikator kinerja pada tahun 2017 dan 2018 sangat rendah bila dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan dalam IKU dan penetapan kinerja tahun 2017 dan 2018. Penurunan capaian indikator kinerja persentase

peningkatan SHU pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016 disebabkan karena jumlah koperasi di Kota Payakumbuh berkurang sebanyak 14 koperasi, dari 158 koperasi pada tahun 2016 menjadi 144 koperasi pada tahun 2017 dan menjadi 145 tahun 2018. Pengurangan jumlah koperasi tersebut karena ada 16 koperasi yang dibubarkan pada tahun 2017, dan ada koperasi baru sebanyak 2 koperasi pada tahun 2017 dan penambahan 1 koperasi pada tahun 2018. Pembubaran koperasi karena koperasi tersebut sudah tidak aktif lagi, pembubaran koperasi yang sudah tidak aktif lagi secara kuantitas akan mengurangi jumlah koperasi namun secara kualitas bertujuan untuk lebih meningkatkan kualitas koperasi yang ada di Kota Payakumbuh. Dengan adanya pembubaran koperasi yang tidak aktif ini otomatis SHU dari koperasi yang dibubarkan tersebut akan hilang dan tidak termasuk dalam penghitungan SHU koperasi pada tahun 2017 sehingga persentase peningkatan SHU koperasi pada tahun 2017 mengalami penurunan namun pada tahun 2018 persentase peningkatan SHU koperasi lebih tingi dibandingkan dengan tahun 2017, namun masih belum mencapai target yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2018. Data jumlah koperasi yang melaksanakan RAT, koperasi yang tidak RAT, koperasi yang tidak aktif, koperasi yang baru dan yang dibubarkan dan jenis koperasi di Kota Payakumbuh tahun 2016-2018 disajikan pada tabel 3.8 dan 3.9 dibawah ini.

Tabel 3.8
Data Jumlah Koperasi yang RAT, Tidak RAT dan yang Tidak Aktif serta yang Baru di Kota Payakumbuh Tahun 2016-2018

NI-	Uraian	Tahun			
No		2016	2017	2018	
1	Koperasi yang RAT	65	69	64	
2	Koperasi yang tidak RAT	81	79	81	
3	Koperasi yang tidak aktif	10	10	65	
4	Koperasi Baru	2	2	1	
5	Koperasi yang bubar	-	16	-	
	Jumlah	158	144	145	

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM

Tabel 3.9 Jenis Koperasi Kota Payakumbuh Tahun 2016-2018

No	Uraian	2016	2017	2018
1	Koperasi Unit Desa	5	5	5
2	Koperasi Fungsional	43	43	43
3	Koperasi Karyawan	8	8	8
4	Koperasi Serba Usaha	53	43	43
5	Koperasi Wanita	7	7	7
6	Koperasi Tani	20	15	15
7	Koperasi Pondok Pesantren	2	2	2
8	Koperasi Simpan Pinjam	5	6	6
9	Koperasi Angkutan Darat	1	1	1
10	Koperasi Pasar	2	0	0
11	Koperasi Peternak Sapi	2	2	2
12	Koperasi PEPABRI	1	1	1
13	Koperasi WREDATAMA	1	1	1
14	Koperasi Veteran	1	1	1
15	Koperasi Kepolisian	1	1	1
16	Koperasi Pedagang Kaki Lima	1	1	1
17	Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah	5	5	5
18	Koperasi Pemasaran	0	2	2
19	Koperasi Produsen	0	0	1
	JUMLAH	158	144	145

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 terjadi penambahan jumlah koperasi yang tidak aktif dari 10 unit menjadi 65 unit pada tahun 2018. Penambahan jumlah koperasi tidak aktif ini disebabkan karena perubahan cara penghitungan keaktifan koperasi, dimana mulai tahun 2018 koperasi yang aktif adalah koperasi yang melaksanakan RAT pada tahun berjalan, sedangkan yang tidak melaksanakan RAT dianggap koperasi yang tidak aktif, berbeda dari tahun sebelumnya dimana koperasi yang tidak melaksanakan RAT selama 3 (tiga) tahun berturut-turut baru digolongkan ke dalam koperasi yang tidak aktif, sehingga pada tahun 2018 jumlah koperasi yang tidak aktif bertambah banyak. Berdasarkan jenis koperasi yang ada di Kota Payakumbuh yang terbanyak adalah koperasi serba usaha, koperasi fungsional

(koperasi pegawai negeri) dan koperasi tani, yang bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam.

Persentase peningkatan koperasi aktif merupakan indikator kinerja eselon III pada Dinas Koperasi dan UKM, dan merupakan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat. Perbandingan capaian kinerja indikator persentase koperasi aktif dengan Provinsi Sumatera Barat disajikan pada tabel 3.10 berikut :

Tabel 3.10
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator
Persentase Peningkatan Koperasi Aktif dengan Capaian Kinerja
Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat

	Reali	sasi	
Indikator	Kota Payakumbuh 2018	Sumbar 2018	Ket
Persentase peningkatan koperasi aktif	55,17%	77,67%	Lebih rendah

Sumber: Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja indikator persentase peningkatan koperasi aktif di Kota Payakumbuh lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator yang sama pada Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat.

Faktor Penghambat terjadinya ketidaktercapaiannya target 10.00% atas peningkatan SHU koperasi di Kota Payakumbuh terdapat beberapa hal sebagai berikut:

1. Keaktifan koperasi di Kota Payakumbuh terjadi penurunan, dimana pada tahun 2018 sebesar 80 koperasi dari tahun sebelumnya sebanyak 133 koperasi, penurunan ini disebabkan salah satunya pada pola perhitungan indikator keaktifan koperasi. Dari 133 koperasi tersebut terdapat hampir 30 koperasi yang statusnya kritis yang membutuhkan pembinaan sangat intens untuk mendongkrak keaktifan koperasi tersebut, sehingga untuk mengejar SHU 10% masih sangat berat. Selanjutnya terkait dengan keaktifan koperasi dalam melakukan RAT baru 80% dari koperasi aktif tahun 2018 yang melaksanakan.

2. Koperasi di Kota Payakumbuh dalam kategori sehat dan cukup sehat sebanyak 46 koperasi dari 80 koperasi yang aktif, sehingga persentasenya sebesar 57,5%. Koperasi yang sehat dan cukup sehat tersebut tentu berpengaruh terhadap capaian SHU koperasi di Kota Payakumbuh. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adanya sistem laporan keuangan koperasi yang belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah yang seharusnya.

Strategi dalam mengatasi persoalan untuk mencapai target 12% persentase peningkatan SHU koperasi di Kota Payakumbuh pada tahun 2019 akan dilaksanakan :

- 1. Peningkatan SDM pengelola dan pengurus koperasi melalui pendanaan dari APBD dan DAK tahun 2019 yang berfokus pada : aspek pelaporan keuangan koperasi dan manajemen kelembagaan perkoperasian.
- Monitoring kegiatan perkoperasian di 133 koperasi yang ada di Kota Payakumbuh yang fokus pada tema-tema pasca pelatihan perkoperasian yang telah dilakukan sebelumnya.
- Membuka akses permodalan dalam bentuk fasilitasi antara koperasi di Kota Payakumbuh dengan penyedia permodalan di tingkat Propinsi Sumatera Barat antara lain BKE (Bank Kesejahteraan Ekonomi) dan PKPRI (Persatuan Koperasi Pegawai Republik Indonesia).

# b. Indikator Persentase Pertumbuhan Aset Koperasi

Nilai asset koperasi merupakan seluruh kekayaan yang dimiliki dan dikelola koperasi untuk menjalankan operasional usaha. Aset merupakan sumber daya yang dikuasai koperasi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dari mana manfaat ekonomi dimasa depan diharapkan akan diperoleh koperasi.

Nilai asset koperasi terdiri atas kas, piutang, perlengkapan dan peralatan koperasi. Formulasi perhitungan persentase pertumbuhan aset koperasi adalah sebagai berikut :

Formulasi Persentase Pertumbuhan Aset Koperasi = (nilai aset tahun n- nilai aset tahun n-1 / nilai aset tahun n-1)  $\times$  100%

Data aset koperasi pada tahun 2016-2018 dapat dilihat pada Tabel 3.11 di bawah ini.

Tabel 3.11 Nilai Aset Koperasi Tahun 2016-2018

No	Uraian		Tahun				
	Graiair	2016 2017 2018					
2	Aset	182.387.520.391	208.906.304.000	219.982.419.000			

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM

Berdasarkan tabel di atas diperoleh capaian kinerja indikator persentase pertumbuhan aset koperasi sebagai berikut :

# (219.982.419.000 - 208.906.304.000) X 100% = 5,30%

### 208.906.304.000

Capaian kinerja nyata indikator Persentase pertumbuhan aset koperasi adalah sebesar 5,30% dari target sebesar 5,00% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 106,00% atau melebihi target yang diperjanjikan.

Tahun 2018 adalah tahun kedua Renstra, capaian Tahun 2018 sebesar 5,30% bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Koperasi dan UKM sebesar 12,60% maka capaian kinerjanya mencapai 42,06%.

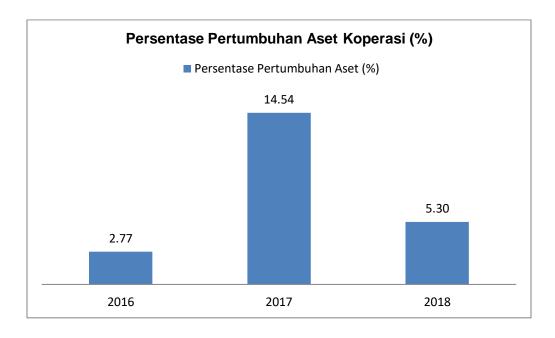
Persentase pertumbuhan aset koperasi tahun 2016-2018 dapat dilihat pada tabel 3.12 berikut :

Tabel 3.12
Persentase Pertumbuhan Aset Koperasi Tahun 2016-2018

No	Uraian	Tahun				
NO	Oralan	2016	2017	2018		
1	Persentase Pertumbuhan Aset Koperasi (%)	2,77	14,54	5,30		

Capaian kinerja nyata persentase pertumbuhan aset koperasi dari tahun 2016-2018 juga dapat dilihat pada gambar 3.2 berikut ini.

Gambar 3.2 Persentase Pertumbuhan Aset Koperasi Tahun 2016-2018



Dari tabel dan gambar dapat dilihat secara keseluruhan dari tahun 2016-2018 pencapaian indikator kinerja persentase pertumbuhan aset koperasi menunjukkan peningkatan, pada tahun 2017 meningkat sangat tinggi dan tahun 2018 turun bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya namun masih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2016 yang merupakan tahun dasar penetapan target indikator kinerja persentase pertumbuhan aset koperasi pada tahun 2017-2022.

Capaian indikator kinerja pada tahun 2018 sudah melebihi target yang ditetapkan namun bila bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 9,24%.

Perbandingan capaian indikator kinerja persentase peningkatan aset koperasi dibandingkan dengan capaian indikator yang sama pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 3.13

# Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Pertumbuhan Aset Koperasi dengan Capaian Kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

Indikator	Real	isasi	Ket		
	Kota Payakumbuh	Provinsi Sumbar			
Persentase pertumbuhan asset koperasi	5,30%	10,44%			

Sumber: Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja indikator persentase pertumbuhan aset koperasi Kota Payakumbuh lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator persentase peningkatan nilai asset koperasi pada Provinsi Sumatera Barat.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kesejahteraan anggota koperasi yang ditunjukkan dari pertumbuhan aset koperasi sebesar 5,30% disebabkan disebabkan faktor pendukung antara lain :

- 1. Tahun 2018 terjadi pertumbuhan jumlah koperasi di Kota Payakumbuh sebanyak 1 unit yang telah berbadan hukum dan 3 unit yang masih dalam proses pengajuan badan hukum.
- 2. Beberapa koperasi yang bergerak dalam izin usaha simpan pinjam memperluas bidang usahanya ke usaha lain yang menyebabkan penambahan aset koperasi seperti koperasi usaha waserda, yang membutuhkan aset etalase, ruangan, mesin kasir dan lain-lain. Tahun 2018 koperasi yang menambah bidang usaha tersebut ada 4 koperasi (Koperasi Pemasaran Kopay, KPRI Tut Wuri Handayani, KPRI Ihwan Depag dan KSU Harapan Baru).

#### Faktor Penghambat

- 1. Volume usaha koperasi pada umumnya belum optimal.
- 2. Masih rendahnya kapasitas SDM pengurus dan manajemen koperasi.

Strategi yang dikerjakan untuk mengatasi persoalan pertumbuhan aset koperasi agar tetap diatas 5% setiap tahunnya antara lain :

- 1. Melakukan revitalisasi terhadap koperasi-koperasi yang tidak aktif.
- 2. Meningkatkan akses permodalan bagi koperasi.

3. Merangsang pengurus koperasi untuk mengurus badan hukum dari koperasi yang dikelolanya.

Capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran meningkatnya kesejahteraan anggota koperasi dari tahun 2016-2018 disajikan pada tabel 3.14 di bawah ini :

Tabel 3.14 Capaian kinerja indikator kinerja sasaran meningkatnya kesejahteraan anggota koperasi Tahun 2016-2018

No	Indikator	Capaian					
NO	ilidikatoi	2016 2017 2018					
1	Persentase peningkatan	8,25	2,18	3,77			
	SHU koperasi						
2	Persentase pertumbuhan	2,77	14,54	5,30			
	aset koperasi						

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM

Program yang mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kesejahteraan anggota koperasi adalah :

- 1. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
- Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
- 3. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja yang mendukung sasaran meningkatnya kesejahteraan anggota koperasi dapat dilihat pada tabel 3.15 di bawah ini.

Tabel 3.15. Program, kegiatan, anggaran dan output yang dihasilkan untuk mendukung sasaran meningkatnya kesejahteraan anggota koperasi

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Menunjang /Kurang
1	Peningkatan Kualitas Kelembagaa n Koperasi	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	4.745.000	2.945.000	Jumlah koperasi yang tidak aktif yang dibubarkan	Mendukung

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Menunjang /Kurang
		Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	25.933.000	15.119.500	Jumlah pra koperasi / koperasi yang badan hukumnya ditertibkan	Mendukung
	Peningkatan Kualitas Kelembagaa n Koperasi	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	253.286.000	244.123.067	Jumlah peserta tangkas terampil koperasi tingkat SLTA dan gerakan koperasi yang dilaksanaka n Jumlah koperasi yang dinilai untuk mengikuti penilaian koperasi berprestasi / koperasi award tingkat nasional, provinsi dan Kota Payakumbu h Jumlah klasifikasi koperasi yang dikelompok kan Jumlah koperasi simpan pinjam yang diawasi	Mendukung
2	Pengemban gan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi UMKM	35.689.500	33.321.670	usahanya Jumlah koperasi yang dikoordinir penggunaa n dana pemerintah nya	Mendukung

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Menunjang /Kurang
		Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah	10.570.000	9.410.000	Jumlah koperasi yang dipantau pengelolaa n dana pemerintah nya	Mendukung
2	Pengemban gan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	16.095.000	14.451.200	Jumlah koperasi peserta sosialisasi Jumlah peserta sosialisasi KUR yang dilaksanaka n Jumlah peserta sosialisasi PKBL- BUMN yang dilaksanaka n	Mendukung
		Penyelenggar aan promosi produk UMKM	84.102.000	83.633.900	Jumlah UMKM yang terlibat dalam kegiatan Harkopnas Expo	Mendukung
3	Program Pengemban gan Kewirausaha an dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD	26.033.000	25.523.000	Jumlah peserta pelatihan manajemen pengelolaa n koperasi/K UD	Mendukung

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran meningkatnya kesejahteraan anggota koperasi, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.16

Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Dinas Koperesi dan Usaha Kecil Menengah
Sasaran 1 Tahun 2018

					Kinerja		Keuangan					
No	Sasaran		Indikator	Satuan	Target	Realisasi	(%)	Program		Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya kesejahteraan	1.1	Persentase peningkatan SHU koperasi	%	10,00	6,03	60.33	1	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	283.964.000	262.187.567	92.33
	anggota koperasi							2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	26.033.000	25.523.000	98.04
		1.2	Persentase pertumbuhan aset koperasi	%	5,00	5,30	106.00	3	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	146.456.500	140.816.770	96.15
		RATA	A-RATA CAPAIAN DARI 2 INI	DIKATOR			83.17		TOTAL PER SASARAN	456.453.500	428.527.337	93.88

#### Sasaran 2

#### Meningkatnya kualitas usaha mikro kecil dan menengah

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.17
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya kualitas usaha mikro kecil menengah

		Camaian		Tahı	un 2018		Target	
No	Indikator Kinerja	Capaian 2017	Satuan	Target	Realisasi	%	Akhir Renstra	%
1.	Persentase Usaha Kecil Menengah terhadap UMKM	27,14	%	27,64	15,27	55,25	29,70	51,41
2.	Persentase pertumbuhan jumlah tenaga kerja sektor UMKM	10,09	%	12,00	14,18	118,17	20,00	70,90
	Rata-rata Capaia	n Kinerja				86,71		61,16

Sasaran meningkatnya kualitas usaha mikro kecil menengah dapat dilihat dari 2 (dua) indikator, sebagai berikut :

- 1. Persentase Usaha Kecil Menengah terhadap UMKM Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyebutkan: "Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dengan kriteria:
  - 1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - 2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### Kriteria Usaha Kecil:

 memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50 juta Rupiah sampai dengan Rp. 500 juta Rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha); atau 2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300 juta Rupiah sampai dengan paling banyak Rp. 2,5 milyar Rupiah.

#### Kriteria Usaha Menengah:

- memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500 juta Rupiah sampai dengan paling banyak Rp. 10 milyar Rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha); atau
- 2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2,5 milyar Rupiah sampai dengan paling banyak Rp. 50 milyar Rupiah.

Capaian indikator kinerja persentase UKM terhadap UMKM diperoleh dengan rumus :

# Formulasi Persentase UKM terhadap UMKM = (jumlah UKM / jumlah UMKM) x 100%

Berdasarkan data perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2018, jumlah usaha kecil adalah sebanyak 2.565 unit dan usaha menengah-besar sebanyak 448 unit, sedangkan jumlah UMKM di Kota Payakumbuh sebanyak 19.727 UMKM sehingga untuk untuk memperoleh nilai persentase UKM terhadap UMKM adalah:

# <u>2.565 + 448</u> x 100% = 15,27%

#### 19.727

Capaian nyata indikator persentase Usaha Kecil Menengah terhadap UMKM adalah 15,27% dari target 27,64% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 55,25% atau dibawah target yang diperjanjikan. Untuk lebih jelasnya data perkembangan UMKM Tahun 2016-2018 disajikan pada tabel 3.18 di bawah ini.

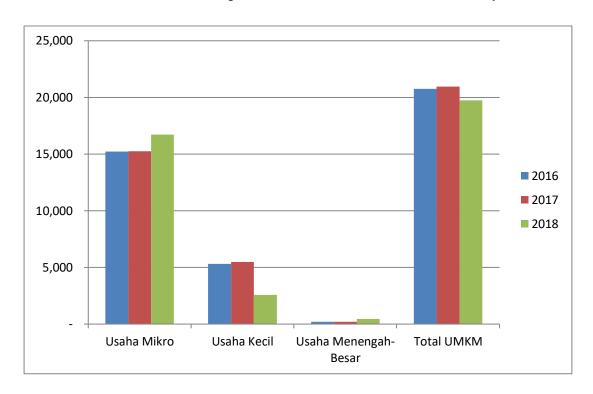
Tabel 3.18 Perkembangan UMKM Tahun 2016-2018

<u> </u>							
Jenis usaha	Satuan	2016	2017	2018			
Usaha Mikro	Unit	15.235	15.262	16.714			
Usaha Kecil	Unit	5.322	5.471	2.565			
Usaha Menengah-Besar	Unit	211	214	448			
Persentase UKM terhadap UMKM	%	26,64	27,14	15,27			
Total UMKM	Unit	20.768	20.947	19.727			

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase Usaha Kecil Menengah terhadap UMKM pada tahun 2018 menurun bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Perkembangan UMKM tahun 2016-2018 juga dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 3.3
Grafik Perkembangan UMKM Tahun 2016-2018 di Kota Payakumbuh



Berdasarkan grafik terlihat bahwa jumlah jenis usaha atau kriteria usaha yang paling banyak adalah usaha mikro, selanjutnya usaha kecil dan usaha menengah. Dari tahun 2016-2017 jumlah UMKM di Kota Payakumbuh mengalami peningkatan, namun pada tahun 2018 jumlah UMKM mengalami penurunan. Pada tahun 2018 jumlah usaha mikro dan usaha menengah-besar meningkat lebih tajam dari tahun-tahun sebelumnya, namun usaha kecil mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena usaha kecil yang telah ada berkembang menjadi usaha menengah-besar dan sebagian lagi turun menjadi usaha mikro yang menyebabkan meningkatnya jumlah usaha mikro di Kota Payakumbuh.

Faktor Penghambat indikator persentase Usaha Kecil Menengah terhadap UMKM adalah :

Tidak tercapainya target persentase Usaha Kecil Menengah terhadap UMKM disebabkan oleh tidak berkembangnya usaha mikro terutama dalam hal produktivitas dan kapasitas usaha. Hal ini disebabkan oleh kondisi perekonomian yang relatif tidak stabil 2 tahun terakhir, dimana beberapa hal menjadi faktor yang mempengaruhinya, antara lain fluktuasi nilai rupiah, fluktuasi harga bahan bakar minyak, dan kondisi perpolitikan terkait dengan pelaksanaan pilkada di beberapa daerah. Kondisi2 tersebut mempengaruhi harga dan distribusi bahan baku bagi produk-poduk yang dihasilkan oleh usaha mikro. Pada daarnya usaha mikro adalah usaha yang paling sensitif terhadap kondisi tersebut di atas karena berbagai keterbatasan yang mereka miliki, antara lain keterbatasan akses permodalan, SDM, dan manajemen pengelolaan usaha itu sendiri.

# 2. Persentase pertumbuhan jumlah tenaga kerja sektor UMKM

Keberhasilan pembangunan identik dengan terciptanya laju pertumbuhan perekonomian dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi, salah satu sektor riil yang dapat mengurangi tingkat pengangguran dan menyerap banyak tenaga kerja adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dimana alat yang digunakan sebagai motor penggeraknya adalah orangorang yang bekerja di perkotaan maupun pedesaan dalam ruang lingkup Usaha Kecil maupun Menengah. Capaian indikator kinerja persentase pertumbuhan jumlah tenaga kerja sektor UMKM diperoleh dengan menggunakan rumus:

Formulasi Persentase pertumbuhan jumlah tenaga kerja sektor

UMKM = (jumlah tenaga kerja tahun ke n dikurangi jumlah tenaga

kerja sektor UMKM tahun ke n-1 / jumlah tenaga kerja sektor UMKM

tahun ke n-1) x 100%

Jumlah tenaga kerja sektor UMKM pada tahun 2016-2018 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.19
Jumlah tenaga kerja Sektor UMKM tahun 2015-2018

No	Uraian		Tal	nun	
140	Oralan	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Tenaga Kerja	32.493	35.742	39.348	44.928
	Sektor UMKM				

Berdasarkan data jumlah tenaga kerja sektor UMKM, selama tahun 2015-2018 terus mengalami peningkatan, dari tahun 2015 smpai dengan 2018 jumlah tenaga kerja sektor UMKM telah meningkat sebanyak 12.435 orang atau sebesar 38,27%. Jumlah tenaga kerja sektor UMKM pada tahun 2018 adalah 44.928 orang dan tahun 2017 sebanyak 39.348 orang, mengalami penambahan sebanyak 5.580 orang, berdasarkan rumus diatas untuk memperoleh persentase pertumbuhan jumlah tenaga kerja sektor UMKM adalah:

$$(44.928 - 39.348) \times 100\% = 14,18\%.$$

#### 39.348

Capaian kinerja nyata indikator persentase pertumbuhan tenaga kerja sektor UMKM adalah sebesar 14,18% dari target sebesar 12,00% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 118,17% atau melabihi target yang diperjanjikan.

Faktor pendukung tercapainya target kinerja:

 Tenaga kerja sektor UMKM lebih banyak disumbangkan oleh lapangan usaha yang bergerak di sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan karena pada prinsipnya pengelolaan usaha di sektor tersebut lebih banyak dikelola secara tradisional dan sampingan dan tidak tergantung dengan bahan baku yang beredar di pasaran.

Strategi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM untuk meningkatkan :

 Meningkatkan program untuk sektor mikro yang terkait dengan peningkatan SDM dan kelembagaan usaha disamping membuka ruang untuk fasilitasi permodalan

- 2. Meningkatkan pola pembinaan melalui pendamping usaha dengan meningkatkan jumlah tenaga pendamping langsung di lapangan (rekrutmen tenaga pendamping)
- 3. Meningkatkan anggaran pembinaan untuk mendukung program pembinaan dan peningkatan SDM UMKM
- 4. Memfasilitasi peralatan pendukung usaha berbasis teknologi tepat guna melalui sumber-sumber lain disamping dana hibah.
- 5. Meningkatkan daya saing usaha terutama dalam hal pemasaran hasil.
- 6. Mensosialisasikan program diversifikasi usaha terkait dengan ketersediaan pangsa pasar yang ada.

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas usaha mikro kecil menengah didukung oleh program :

- 1. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM
- 2. Program pengembangan sistem pendukung bagi UMKM
- 3. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
- 4. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri.

Program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas usaha mikro kecil menengah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.20.
Program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output yang dihasilkan untuk mendukung sasaran meningkatnya kualitas usaha mikro kecil dan menengah

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Dampak Baik/Kurang
1	Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	53.265.000	53.104.747	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan bagi wirausaha pemula/calon wirausaha baru yang dilaksanakan Jumlah peserta AMT bagi pengusaha mikro kecil yang dilaksanakan	Baik
		Penyusunan buku profil koperasi dan UMKM	115.092.900	108.897.200	Jumlah buku profil koperasi dan UMKM yang dicetak	Baik
2	Pengembangan sistem pendukung bagi	Sosialisasi dukungan informasi	16.095.000	14.451.200	Jumlah peserta sosialisasi KUR yang	Baik

Baik
Baik
1
D-11
Baik
4
Baik
Baix
-
Baik
4
1
1
i

Capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas usaha mikro kecil menengah dari tahun 2016-2018 disajikan pada tabel 3.21 di bawah ini :

Tabel 3.21 Capaian kinerja indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas usaha mikro kecil menengah

No	Indikator	Capaian						
	indikator	2016	2017	2018				
1	Persentase UKM terhadap UMKM	26,64	27,14	15,27				
2	Persentase pertumbuhan jumlah tenaga kerja sektor UMKM	10.00	10,09	14,18				

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas usaha kecil dan menengah, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel 3.20 berikut :

Tabel 3.22

Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Dinas Koperesi dan Usaha Kecil Menengah
Sasaran 2 Tahun 2018

			Indikator		•			angan					
No	Sasaran	indikator		Satuan	Target	Realisasi	(%)		Program	Pagu	Realisasi	%	
2	Meningkatnya 2.1 kualitas usaha mikro	Menengah terhadap	%	27.64	15.27	55,25	1	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	23.041.360	23.030.700	99.95		
	kecil menengah		UMKM					2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	168.357.900	162.001.947	96.22	
									3	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	0	0	0.00
		2.2	Persentase pertumbuhan tenaga kerja sektor UMKM	%	12.00	14.18	118.17	4	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	1.274.650.928	1.158.561.747	90.89	
		•		86.71		TOTAL PER SASARAN	1.466.050.188	1.343.594.394	91.65				

#### Sasaran 3

#### Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.23
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

No	Indikator Kinerja	Capaian	Satuan	Tahu	ın 2018	%	Target Akhir	%	
140	ilidikator Killerja	2017	Jatuari	Target	Realisasi	76	Renstra	76	
1.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	24,03	%	23,97	24,16	100,79	24,17	99,96	
2	Persentase pertumbuhan omset	-	%	27,00	6,45	23,89	35,00	18,43	
	Rata-rata Capaian	Kinerja				62,34		59,20	

Sasaran meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dapat dilihat dari 2(dua) indikator, sebagai berikut :

#### 1. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non residen. Kategori perdagangan besar dan eceran meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut.

Capaian indikator kinerja kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB merupakan angka yang diperoleh dari BPS Kota Payakumbuh. Tahun 2018 per Januari 2018 angka kontribusi sektor perdagangan belum muncul di Buku PDRB, biasanya baru dirilis pada bulan Agustus, karena angkanya belum ada maka kontribusi sektor perdagangan belum bisa terlalu detil.

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB diperoleh berdasarkan angka proyeksi menggunakan tren kenaikan 5 tahun, karena BPS belum mengeluarkan data PDRB. Berdasarkan angka proyeksi capaian nyata indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB diperoleh nilai 24,16% dari target 23,97% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja

Tahun 2018, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,79% atau melebihi target yang diperjanjikan. Perkembangan sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Payakumbuh tahun 2016-2018 disajikan pada tabel berikut ini:

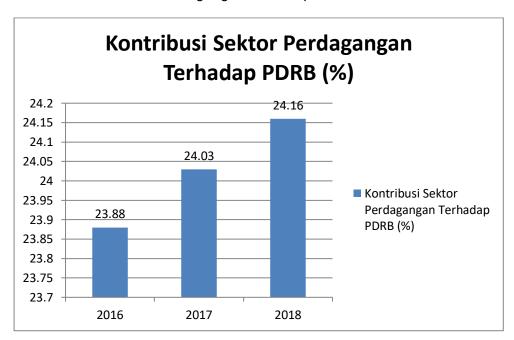
Tabel 3.24
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kota Payakumbuh
Tahun 2016-2018

NO.	TAHUN	PERDAGANG A	AN
		NILAI (Rp. X juta)	%
1.	2016	1.192.225,30	23,88
2.	2017	1.384.611,52	24,03
3.	2018	1.509.313,74	*24,16

Sumber: PDRB Kota Payakumbuh Menurut Lapangan Usaha

Capaian indikator kinerja kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tahun 2016-2018 dapat digambarkan dengan gambar 3.4 dibawah ini :

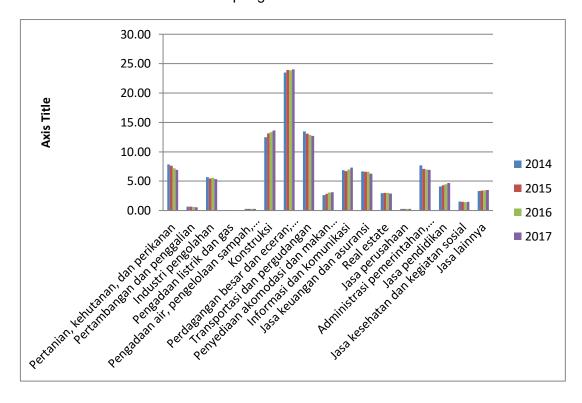
Gambar 3.4 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Tahun 2016-2018



Berdasarkan grafik terlihat bahwa kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Payakumbuh menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya, artinya sektor perdagangan memberikan kontribusi yang terus

meningkat setiap tahun dan merupakan sektor yang paling tinggi menyumbang terhadap PDRB Kota Payakumbuh. Hal ini dapat dilihat dari distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tahun 2014-2017 yang disajikan pada gambar 3.5 berikut :

Gambar 3.5
Distribusi persentase PDRB Kota Payakumbuh atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tahun 2014-2017



#### 2. Persentase pertumbuhan omset

Omset adalah jumlah uang hasil penjualan barang dagangan tertentu selama suatu masa jual. Indikator pertumbuhan omset merupakan indikator kinerja baru, dimana pada tahun sebelumnya belum termasuk ke dalam IKU Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh.

Persentase pertumbuhan omset menggunakan rumus :

Formulasi Persentase pertumbuhan omset = (jumlah omset tahun ke n dikurangi jumlah omset tahun ke n-1 / jumlah omset tahun ke n-1) x 100%

Untuk perhitungan omset menggunakan asumsi omset untuk 3 (tiga) komoditi unggulan Kota Payakumbuh yaitu beras dan daging sapi dan telur. Diasumsikan bahwa semua produksi padi di Kota Payakumbuh diproses menjadi beras dengan angka konversi GKP (Gabah Kering Panen) menjadi beras sebesar 52%, dipasarkan di pasar Ibuh Barat dan Timur dan ke sentra-sentra pemasaran beras di sekitar Kota Payakumbuh sampai ke Propinsi Riau. Demikian juga dengan produksi daging sapi yang diambil dari data pemotongan sapi di rumah potong hewan (RPH) Kota Payakumbuh yang diasumsikan semuanya dipasarkan di Pasar Ibuh Barat dan Timur. Selanjutnya untuk telur diambil dari data produksi telur selama 2 (dua) tahun terakhir dan semuanya dipasarkan di Pasar Ibuh Barat dan Timur. Data produksi padi (beras), daging sapi dan telur tahun 2017 dan 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.25
Produksi Padi, Daging Sapi dan Telur di Kota Payakumbuh
Tahun 2017-2018

No	Uraian	Produksi				
140	Oralan	2017	2018			
1	Padi (GKP) (Ton)	41.150	41.515			
2	Beras (Kg)	21.398.000	21.587.800			
2	Daging Sapi (Kg)	939.256	914.820			
4	Telur (butir)	7.437.540	7.668.366			

Sumber : Dinas Pertanian Kota Payakumbuh

Selanjutnya untuk untuk data harga ketiga komoditi di atas diperoleh dari data informasi harga pangan dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, yang merupakan harga rata-rata selama tahun 2017 dan 2018. Data harga tersebut disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.26
Harga rata-rata komoditas beras, daging sapi dan telur tahun 2017-2018

No	Uraian	Harga (Rp)				
	<u> </u>	2017	2018			
1	Beras (Kg)	12.500	13.700			
2	Daging Sapi (Kg)	120.000	120.000			
3	Telur (butir)	1.500	1.443			

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh

Untuk memperoleh data omset produksi tahun 2017 dikalikan dengan harga rata-rata tahun 2017, demikian juga tahun 2018 produksi dikalikan dengan harga rata-rata tahun 2018 untuk ketiga komoditi tersebut. Data omset untuk 3 (tiga) komoditi unggulan Kota Payakumbuh Tahun 2017-2018 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.27
Omset Komoditi Beras, Daging Sapi dan Telur
Kota Payakumbuh Tahun 2017-2018

No	Uraian	Omset (Rp)			
140	Graian	2017	2018		
1	Beras (Kg)	267.475.000.000	295.752.860.000		
2	Daging Sapi (Kg)	112.710.720.000	109.778.400.000		
3	Telur (butir)	11.156.310.000	11.065.452.138		
	Jumlah	391.342.030.000	416.579.355.138		

Dari tabel diatas diperoleh omset tahun 2017 adalah Rp. 391.342.030.000,- dan tahun 2018 sebesar Rp. 416.579.355.138,- sehingga berdasarkan rumus perhitungan persentase pertumbuhan omset adalah sebagai berikut :

# (416.579.355.138 - 391.342.030.000) x 100% = 6,45%. 391.342.030.000

Berdasarkan perhitungan di atas capaian kinerja nyata indikator persentase pertumbuhan omset adalah 6,45% dari 27,00% target kinerja yang direncanakan pada perjanjian kinerja tahun 2018, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 23,89% atau tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Indikator kinerja persentase pertumbuhan omset merupakan indikator kinerja baru, dimana belum ada pada tahun-tahun sebelumnya sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan capaian nyata indikator kinerja tersebut dengan tahun-tahun sebelumnya.

Capaian kinerja sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan didukung oleh program :

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

- 2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri
- 3. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dapat dilihat pada tabel 3.28 berikut :

Tabel 3.28
Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan untuk mendukung sasaran meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Dampak Baik/Kurang
1	Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Fasilitasi penyelesaian permasalahan- permasalahan konsumen	155.248.000	129.177.547	Jumlah alat UTTP yang dilakukan tera ulang Persentase pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti	Baik
		Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	506.483.250	493.102.000	Jumlah RTS yang menerima pembagian sembako Jumlah bazaar ramadhan Jumlah pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan yang dilaksanakan Jumlah monitoring harga sembako yang dilaksanakan	Baik
2	Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha	21.861.500	21.719.940	Jumlah distributor dan pengecer pupuk bersubsidi yang difasilitasi dalam perijinan dan pengembangan usaha  Jumlah distributor berasi yang difasilitasi dalam perijinan dan pengembangan usaha  Jumlah pengumpul hasil bumi yang difasilitasi dalam perijinan	Baik

					dan pengembangan usaha	
		Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	2.943.873.862	2.528.923.412	Jumlah prasarana pasar yang dikembangkan	Baik
		Pengembangan pasar lelang daerah	137.664.000	111.736.720	Jumlah kegiatan pasar lelang dalam/luar daerah yang dilaksanakan	Baik
		Peningkatan efisiensi kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan pendapatan asli daerah	118.721.000	106.634.652	Jumlah karcis yang dicetak untuk pemungutan PAD	Baik
		Pemeliharaan rutin/berkala usaha	366.580.000	328.109.534	Pelaksanaan pasar pabukoan Pemeliharaan rutin bangunan	Baik
		perdagangan			pasar Pemeliharaan rutin drainase pasar	
3	Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan	1.795.296.932	1.783.203.670	Tim operasional trantib pasar Jumlah THL trantib pasar	Baik
		Pengawasan mutu dagangan pedagang kaki lima dan asongan	29.146.000	27.939.000	Jumlah penyuluhan mutu barang terhadap pedagang kaki lima dan asongan yang dilaksanakan	Baik

Keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

#### Faktor pendukung:

- Pembinaan yang kontinyu dari Bidang Perdagangan dan Bidang Pasar Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh terhadap pedagang yang ada di pasar (pedagang kaki lima dan asongan) yang meliputi kualitas dan mutu barang dagangan, serta perlindungan konsumen.
  - Dokumentasi kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas mutu barang dagangan dan perlindungan konsumen :

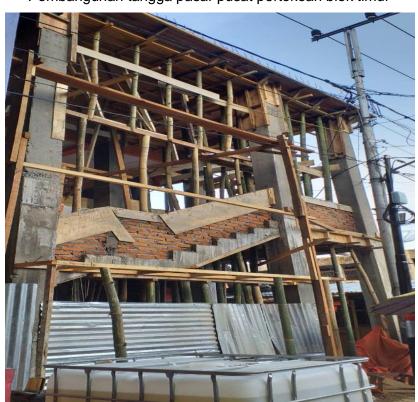








2. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pendukung pasar dalam menciptakan ruang perdagangan semakin tumbuh di Kota Payakumbuh. Fasilitas yang dibangun pada Tahun 2018 antara lain : pembangunan tangga pasar pusat pertokoan blok timur, pembangunan pos jaga keamanan pasar padang kaduduak, rehab jalan lingkung pasar ibuh barat, pengecatan pasar ibuh barat dll. Berikut foto-foto pembangunan sarana dan prasarana pasar :



Pembangunan tangga pasar pusat pertokoan blok timur

Rehab jalan lingkung pasar Ibuh Barat



Pembangunan pos jaga keamanan pasar padang kaduduak



# Pengecatan pasar ibuh barat



 Keberpihakan Pemerintah Kota Payakumbuh semakin meningkat dalam mengembangkan perdagangan dan Pedagang kaki lima dan asongan di Kota Payakumbuh dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016.

#### Faktor Penghambat

- Pertumbuhan pedagang di Kota Payakumbuh termasuk tinggi sehingga Dinas Koperasi dan UKM mengalami kesulitan dalam mendapatkan validitas data yang digunakan untuk proses pembinaan, pelatihan maupun fasilitasi permodalan.
- Sarana transportasi dalam mendukung pertumbuhan perdagangan di kawasan Pasar Padang Kaduduak belum memadai, sehingga pertumbuhan pasar di kawasan tersebut cenderung lambat.

Strategi terkait dengan pencapaian indikator kontribusi perdagangan terdahap PDRB dan pertumbuhan omset adalah:

a. Menyiapkan sentra pasar Padang Kaduduak sebagai pusat pertumbuhan distribusi barang pertanian Kota Payakumbuh ke daerah lain baik inter maupun antar Propinsi.

- b. Tetap melaksanakan pembinaan kepada pedagang baik di tingkat eceran maupun pedagang besar di wilayah Kota Payakumbuh.
- c. Menyiapkan cluster-cluster terhadap pedagang di sentra pasar Kota Payakumbuh dengan kepastian identitas jenis usaha.
- d. Meningkatkan kualitas perlindungan konsumen terhadap usaha perdagangan melalui penyediaan sarana prasarana kemetrologian.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.29

Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Dinas Koperesi dan Usaha Kecil Menengah
Sasaran 3

	No. Sasaran		Indikator	Kinerja			Keuai			ngan		
No	Sasaran	Indikator		Satuan	Target	Realisasi	(%)		Program	Pagu	Realisasi	%
3	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan	3.1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	23.97	24.16	100.79	1	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	661.731.250	622.279.547	94.04
	terhadap PDRB							2	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	3.451.036.362	2.985.387.538	86.51
								3	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	1.824.442.932	1.811.142.670	99.27
								4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	159.765.000	158.405.000	99.15
		3.2	Persentase pertumbuhan omset	%	27.00	6.45	23.89					
		RATA	A-RATA CAPAIAN DARI 1 INI	DIKATOR			62.34	Т	OTAL PER SASARAN	6.096.975.544	5.577.214.755	91.48

#### Sasaran 4

#### Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi dan UKM

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.30
Analisis Pencapaian Sasaran 4
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan UKM

No	Indikator Kinerja	Capaian 2017	Satuan	Tahu	ın 2018	%	Target Akhir Renstra	%
				Target	Realisasi			
1.	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	BB	Nilai	BB	A	115,14	Α	115,14
Rata-rata Capaian Kinerja						115,14		

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Kota Payakumbuh

Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi dan UKM dapat dilihat dari 1 (satu) indikator, sebagai berikut :

### 1. Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat

Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi dan UKM diindikasikan dengan nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dinyatakan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibangun dan dikembangkan dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan program instansi pemerintah. Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, makaperlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Implementasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerinta di daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai dengan yang diamanahkan dalam RPJMD.

Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang bertugas untuk melaksanakan evaluasi AKIP OPD dan reviuw LKjIP. Untuk tahun 2017 nilai AKIP Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Implementasi SAKIP Nomor :

700/09.g/lnsp-Pyk/2018 tanggal 13 April 2018, Dinas Koperasi dan UKM memperoleh nilai 80,92 dengan kategori A (memuaskan), memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel.

Capaian indikator nilai evaluasi AKIP oleh inspektorat adalah A dibandingkan target BB pada perjanjian kinerja tahun 2018, sehingga persentase capaiannya adalah 115,14%, capaian ini lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi dan UKM didukung oleh 4 program yaitu : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.31

Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Dinas Koperesi dan Usaha Kecil Menengah
Sasaran 4

			Kinerja				Keuangan					
No	Sasaran	Indikator		Satuan	Target	Realisasi	(%)	Program		Pagu	Realisasi	%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	4.1	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	BB	А	115.14	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.622.312.358	1.551.095.285	95.61
	Dinas Koperasi dan UKM							2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	575.913.500	352.313.276	93.53
								3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	38.700.000	22.915.750	87.07
								4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7.900.000	24.200.500	98.11
		RAT	A-RATA CAPAIAN DARI 1 INC	DIKATOR			115.14	TOTAL F	PER SASARAN	2.244.825.858	2.131.198.985	94.94

TINGKAT <u>EFISIENSI</u> 20.20 % TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u> 121.28 %

# C. Akuntabilitas Keuangan

Selama Tahun 2018 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh DPA Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuhdengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 10.264.305.090,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 9.480.535.471,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 92,36%, dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2018 Dinas Koperasi dan UKM kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 783.769.619,- hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien.

Dari jumlah dana sebesar Rp. 10.264.305.090,- tersebut, untuk pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran strategis Renstra Dinas Koperasi dan UKM adalah Rp. 8.019.479.232,- terealisasi Rp. 7.349.336.496,- atau 91,64% sedangkan untuk pencapaian sasaran akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi dan UKM adalah sebanyak Rp. 2.244.825.858,-terealisasi Rp. 2.131.198.985,- atau 94,94%.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap sasaran strategis Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh pada Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.32
Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh
Tahun 2018

No.	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya kesejahteraan anggota koperasi	456.453.500	428.527.337	93,88%
2	Meningkatkan kualitas usaha mikro kecil menengah	1.466.050.188	1.343.594.394	91,65%
3	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	6.096.975.544	5.577.214.755	91,48%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi dan UKM	2.244.825.858	2.131.198.985	94,94%
	Jumlah	10.264.305.090	9.480.535.471	92,36%

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran strategis organisasi serta tingkat efisisensi

yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh pada Tahun 2018.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada Tahun 2018 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.33
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Dinas Koperasi dan UKM Kota
PayakumbuhTahun 2018

No.	Kategori	Jumlah	Presentase	Anggaran		
		Indikator	Capaian Kinerja	Realisasi (Rp.)	%	
A.	Sasaran 1	2		428.527.337	93,88	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	106,00%			
2	Sesuai Target					
3	Tidak Mencapai Target	1	60,33%			
B.	Sasaran 2	2		1.343.594.394	91,65	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	118.17%			
2	Sesuai Target					
3	Tidak Mencapai Target	1	55,25%			
C.	Sasaran 3	2		5.577.214.755	91,48	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	100,97%			
2	Sesuai Target					
3	Tidak Mencapai Target	1	23.89%			
C.	Sasaran 4	1		2.131.198.985	94,94	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	115,14%			
2	Sesuai Target	_				
3	Tidak Mencapai Target					

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja sasaran organisasi.

# D. Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas

prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut, sebagai berikut :

Tabel 3.34
Prestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun
1	Juara I Lomba Pasar	Juara I Kategori Pasar Yang	2018
	Rakyat	Dikelola Pemerintah Daerah	
2	Pasar Ibuh sebagai	Pasar Ibuh sebagai pasar ber SNI	2018
	pasar SNI		

# BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh Tahun 2018 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh Tahun 2018. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh Tahun 2018 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun 2018 Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 83,17% atau interpretasi baik.

Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 86,71% atau interpretasi baik.

Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 62,34% atau interpretasi kurang.

Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 115,14% atau dengan interpretasi sangat baik.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 (empat) sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 10.264.305.090,-sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 9.480.535.471,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 92,36%, dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2018 Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 783.769.619,-

Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh 2017-2022 menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun kedua dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada Tahun 2018, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut:

Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 83,17% atau interpretasi baik.

Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 86,71% atau interpretasi baik.

Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 62,34% atau interpretasi kurang.

Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 115,14% atau dengan interpretasi sangat baik.

Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 22.012.531.601,- (dua puluh dua milyar dua belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam ratus satu rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh adalah 91,13% dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukan bahwa perencanaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Payakumbuh.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan UKMKotaPayakumbuh ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun fihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Payakumbuh.

Payakumbuh, Januari 2019

KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM,

Pembina Utama Muda / IV c NIP.19621031 198503 1 005